



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Mampang Prapatan Jl. K No 37 RT/RW 06/04. Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790
✉: seknas_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org Tlp/ Fax: (021) 7947608.
Website: <http://www.seknasfitra.org> & <http://www.info-anggaran.com>

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.02.10/03-14
Judul	Kritik Terhadap DPR Dalam Kebijakan APBN	Tanggal	10 Maret
Sub Judul		Tahun	2014
Event Terkait		Penulis	Yenny sucipto
Kata Kunci	APBN		

Kritik Terhadap DPR Dalam Kebijakan APBN

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa APBN bukan hanya sekedar perwujudan pengelolaan keuangan negara saja, tetapi merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 23 dinyatakan bahwa anggaran negara ditetapkan dengan undang-undang, artinya dengan persetujuan wakil rakyat. Disinilah letak kedaulatan rakyat yang kemudian diwakili oleh DPR dalam memberikan persetujuan anggaran negara.

Dalam prakteknya, APBN lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik tertentu baik pribadi, kelompok maupun golongan yang dibawa oleh anggota DPR tanpa lagi memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat beberapa point penting yang menjadi catatan FITRA terhadap kerja-kerja DPR dalam melaksanakan fungsi budgeting dalam membuat kebijakan APBN, antara lain:

- **DPR diam dan Menyetujui Kebijakan Anggaran Belanja yang Tidak Berpihak pada Rakyat.** DPR tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi budgetingnya, dengan menyetujui APBN sebagai produk kebijakan anggaran belanja yang tidak bersentuhan dengan rakyat kecuali sebatas berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan stabilitas pada belanja pegawai dan barang.
- **DPR tidak menggunakan fungsi Budgetingnya demi kesejahteraan rakyat.** Akibatnya terjadi ketimpangan alokasi di dalam APBN, antara lain:
 - Anggaran kesehatan hanya berkisar 2% dari total APBN (mengingat problematika kesehatan masih menjadi raport merah) dalam 5 tahun terakhir. DPR tidak pernah memastikan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, padahal UU no. 36/2009 sudah diimplementasikan sejak tahun 2009, bahkan cenderung mengalami penurunan alokasi. Padahal Kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang harus diperjuangkan oleh DPR;
 - Sektor pertanian hanya berkisar 3-4% (padahal sektor ini menyerap sekurangnya sekitar 55% dari total tenaga kerja);

- Infrastruktur hanya sekitar 10%;
- Sedangkan untuk cicilan utang dan bunga utang mencapai 20%. Setiap tahun selalu saja ada penarikan pinjaman program dan proyek (utang baru), tidak ada upaya dari DPR untuk menahan atau menolak pinjaman utang baru yang dilakukan pemerintah.
- **DPR tidak berpihak kepada rakyat.** Tidak berpihak karena DPR nyata-nyata menyetujui kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi energi yang tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran kesejahteraan sosial. DPR juga membiarkan alokasi subsidi non energi stagnan dan cenderung diturunkan, bahkan DPR menyetujui pencabutan beberapa subsidi yang langsung menyangkut kehidupan rakyat miskin (ex. Subsidi Kedelai dan Minyak Goreng);
- **Fungsi Budgeting DPR dalam memperjuangkan kemandirian daerah dalam pembangunan tidak optimal.** DPR menyetujui transfer daerah selama 5 tahun terakhir rerata hanya mencapai 31%, termasuk diulur-ulurnya pembahasan UU Pemda mengenai penyelenggaraan urusan sejak tahun 2009, dan UU Perimbangan Keuangan.
- **DPR tidak pernah serius melakukan pembahasan dalam pengelolaan BUMN.** Seolah BUMN memang sengaja dijadikan “Sapi Perahan”, termasuk pengelolaan laba di tahan di BUMN sebesar Rp 407,5 triliun, yang berpotensi di manfaatkan oleh kelompok kepentingan karena tidak ada aturan/regulasi yang jelas dalam pengelolaan laba untuk ekspansi tersebut
- **DPR seharusnya mampu melakukan tekanan terhadap pemerintah bahwa laba ditahan di BUMN tersebut mestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.**
 - Seharusnya DPR menarik laba ditahan pada TA 2012 sebesar Rp 407,5 triliun untuk menutup defisit sebesar 80 triliun dalam pembahasan APBN-P 2013 sehingga tidak perlu justifikasi menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun
 - Karena dengan laba ditahan dapat mengcover pembengkakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun dan kompensasi Rp 30 triliun tanpa harus membebankan tanpa harus menaikkan harga BBM sebesar Rp 6.500 dalam APBN-P 2013
 - Atau dengan menarik laba yang ditahan, dapat memasukkan kembali subsidi kedelai (Rp 225,7 triliun) dan minyak goreng (Rp 103 triliun) yang sudah dihapus sejak tahun 2008 dalam belanja subsidi negara
 - Atau dengan menarik laba yang ditahan dapat mealkukan desain program untuk perluasan lahan petani 500 – 1 juta Ha, untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor menuju pada kedaulatan pangan
- **Kekecewaan terbesar rakyat, adalah DPR menyetujui usulan kenaikan BBM dari pemerintah.** Penyesuaian kenaikan BBM tahun 2013 menjadi ajang tawar menawar antar parpol di DPR
 - DPR menyetujui keinginan pemerintah menaikkan harga BBM menjadi Rp. 6.500. Padahal alasan pemerintah mengenai beban subsidi BBM harus dikurangi agar tidak jebol APBN, tidak sesuai kenyataan. Tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20% terhadap defisit, sementara penurunan perpajakan berkontribusi 66% terhadap defisit.
 - DPR menyetujui cara Pemerintah mengorbankan masyarakat dengan dalih kesehatan fiskal (yang ternyata tidak benar karena defisit malah membengkak). Saat BBM dinaikkan, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5% dan inflasi sekitar 8,5-9%.
 - Hal ini tentunya terjadi kemerosotan pada kesejahteraan rakyat dan DPR memaksa rakyat menanggung sendiri tanpa melakukan pemotong belanja K/L yang maksimal (hanya Rp 7,1 triliun dan blj pegawai Rp 1,4 triliun saja)

- **APBN dijadikan program dan proyek titipan oleh DPR untuk kepentingan politik.** Adanya kenaikan yang cukup tinggi pada dana optimalisasi hingga mencapai, Rp 26,9 triliun dari Rp 13 triliun, dan kenaikan dana penyesuaian hingga mencapai Rp 87,9 triliun tahun 2014. Kenaikan ini tanpa dibarengi dengan evaluasi penggunaan oleh K/L tahun sebelumnya, dan tanpa dasar yang jelas dalam penetapannya. Sehingga sudah pasti kepentingannya murni untuk mencari sumber “dana haram” untuk pemenangan Pemilu parpol yang berkepentingan.

Menjelang pemilihan legislatif pada april nanti, kesadaran atas peran DPR dalam menjamin kesejahteraan masyarakat perlu dipertegas kepada calon-calon wakil rakyat. Dan berangkat dari pemikiran diatas, FITRA menyatakan seruan kepada seluruh rakyat :**“JANGAN PILIH CALON LEGISLATIF YANG TIDAK MEMILIKI KUALITAS DALAM MENJALANKAN FUNGSI BUDGETING”**. Rakyat harus memilih calon legislatif yang mempunyai kemampuan dan keberpihakan dalam merumuskan kebijakan APBN yang berpihak pada rakyat.

Jakarta, 10 Maret 2014

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

(Seknas FITRA, Pokja 30, FITRA Jatim, FITRA Jateng, FITRA Sukabumi, FITRA Sumut, FITRA Sumsel, FAKTA Kalbar, Solud NTB, FITRA NTB, AWASI APBD Cilacap, FITRA Riau, Yasmib Sulselbar, Formasi Kebumen)

Sekjen FITRA
Yenny Sucipto
Cp.081333111446